

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KREDIT  
DALAM UPAYA PENINGKATAN TINGKAT  
LIKUIDITAS PADA PT. BPR GROGOL JOYO**



**TUGAS AKHIR**

Disusun Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Ahli Madya

Program Studi Diploma III Keuangan Dan Perbankan

Oleh :

**Septian Fika Widyaningrum**

**F.3607085**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEUANGAN DAN PERBANKAN**

**FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**SURAKARTA**

**2010**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia, sangatlah tergantung pada adanya pertumbuhan di berbagai sektor yang secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhinya. Perbankan Indonesia, merupakan salah satu sektor yang menunjang pelaksanaan perekonomian dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Perbankan termasuk perusahaan industri jasa, yang produk utamanya adalah memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat.

Berdasarkan pada Undang – undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan Undang – Undang No. 10 Tahun 1998, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan bank sendiri merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Hal ini sesuai dengan fungsi bank yaitu sebagai *financial intermediary intitutions* yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali untuk berbagai tujuan. Berdasarkan jenisnya bank

ada 2 yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan rakyat (BPR). Kedua jenis bank ini sama – sama dalam menjalankan fungsinya dan kegiatannya, yang membedakan adalah Bank Perkreditan Rakyat dalam kegiatannya tidak melakukan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan tidak menerima simpanan berupa giro.

Sumber dana yang berasal dari masyarakat berupa simpanan tabungan dan deposito serta sumber dana internal BPR cenderung akan lebih banyak dialokasikan pada kegiatan kredit BPR. Wilayah dalam BPR beroperasi terbatas pada suatu wilayah tertentu. BPR mengalami perkembangan karena BPR lebih mengarah sasarannya kepada kebutuhan atau kredit bagi masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan dana untuk pengembangan usaha ataupun untuk konsumsi rumah tangga, jadi intinya usaha pokok dari BPR adalah kredit.

Pokok usaha BPR adalah kredit, maka diperlukan suatu pengelolaan kredit, supaya kredit yang diberikan oleh bank dapat mencapai hasil dan sasaran yang tepat. Pengelolaan kredit ini ada bertujuan untuk meminimalkan hal – hal yang dapat terjadi di luar perhitungan dan supaya kolektibilitas kredit dinilai baik. Melakukan pengelolaan kredit berarti melaksanakan fungsi – fungsi manajemen, dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan kredit. Fungsi ini dilakukan oleh satu manajemen yang namanya manajemen kredit, yang secara luasnya manajemen kredit melakukan pengelolaan kredit dengan baik di mulai dari perencanaan jumlah kredit,

penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit sampai dengan pengawasan dan pengendalian kredit yang macet.

Dalam pengelolaan kredit, terdapat hubungan dengan likuiditas untuk mengukur kinerja suatu bank. Pengukuran likuiditas ini diukur melalui *Quick Rasio*, *Banking Ratio (LDR)*, *Loan to Asset Rasio* dan *Cash Rasio* dan untuk menilai kualitas kredit dilihat dari *Non Performing Loan (NPL)*. Perhitungan Likuiditas ini untuk mengukur BPR dalam menyalurkan dananya dan likuiditas dimana BPR mampu memenuhi kewajibannya dalam jangka pendek berkaitan dengan dana yang dimiliki. Apabila BPR dalam memberikan jumlah penyaluran dana kreditnya yang begitu besar bahkan melebihi 80% dari total asset yang dimiliki akan berakibat terganggunya likuiditas bank, hal ini terjadi karena sumber dana yang tersimpan dari masyarakat terpakai dalam pemakaian kredit. Jika dalam penyalurannya, kredit yang diberikan melebihi batas akan menimbulkan suatu resiko yaitu muncul indikasi terjadinya kredit kurang lancar, diragukan dan macet yang di perhitungkan dalam menentukan NPL (*Non Perfoming Loan*). Munculnya indikasi kredit kurang lancar, diragukan dan macet dikarenakan masyarakat tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjam tepat pada waktunya. Hal ini dapat menimbulkan kinerja likuiditas dan operasi BPR terganggu.

Oleh karena itu diperlukan suatu pengelolaan kredit secara professional dan baik sehingga diharapkan dapat meningkatkan likuiditas, karena tingkat likuiditas yang tinggi menunjukkan kinerja BPR yang baik.

Dari pemaparan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu analisa berkaitan dengan pengelolaan kredit dan likuiditas bank. Adapun objek penelitian dari penulis adalah PT. BPR GROGOL JOYO. Maka untuk itu penulis akan melakukan penelitian dalam tugas akhir ini dengan judul :

**“ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KREDIT DALAM UPAYA PENINGKATAN TINGKAT LIKUIDITAS PADA PT. BPR GROGOL JOYO”.**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Efektivitas Pengelolaan Kredit yang di terapkan pada PT. BPR GROGOL JOYO untuk pencapaian tingkat Likuiditas yang baik?

## **C. TUJUAN**

Adapun penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk :

1. Mengetahui seberapa Efektivitas Pengelolaan Kredit PT. BPR GROGOL JOYO yang dilakukan dalam upaya peningkatan Likuiditas.

## **D. MANFAAT**

Adapun manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi berkenaan dengan efektivitas pengelolaan kredit bagi PT. BPR GROGOL JOYO dalam meningkatkan Likuiditas BPR tersebut.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai Pengelolaan Kredit dan Likuiditasnya.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian berikutnya dan dapat dijadikan informasi tambahan.

## **E. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Penelitian kualitatif yang menekankan pada maknanya, lebih memfokuskan pada data kualitas dengan analisis kualitasnya. Terhadap data kuantitas, penelitian kualitatif tetap memandangnya sebagai kuantitas dan harus diolah dalam pola pikir kuantitatif (dengan hitungan angka), sama sekali tidak dipaksakan untuk dianalisa secara kualitatif. Disini data kuantitas dihitung (bahkan bisa menggunakan perhitungan statistik) tidak dengan arahan pembuktian bagi suatu prediksi, tetapi digunakan sebagai fenomena pendukung analisa kualitatif bagi kemantapan makna sebagai simpulan akhir penelitian (H.B Sutopo, 2002 : 48).

## 1. Desain penelitian

Adalah rencana dan struktur penyelidikan yang dibuat sedemikian rupa, sehingga dapat diperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian (M. Iqbal Hasan, 2002 : 31).

Desain penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah :

### a. Pengumpulan data

Data tersebut diolah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian

### b. Di sajikan sesuai dengan analisis yang dipakai untuk menjelaskan penelitian yang diteliti.

### c. Pengambilan kesimpulan berdasarkan atas hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

## 2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah PT. BPR GROGOL JOYO Sukoharjo yang beralamat pada Jalan Raya Solo Baru, Kompleks Plaza HB 01, Solo Baru, Grogol, Sukoharjo,

## 3. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan untuk melakukan pembahasan tugas akhir adalah : Laporan Keuangan Triwulan Tahun 2009.

## b. Sumber Data

### 1) Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber penelitian secara langsung. Data primer dalam penelitian ini berupa wawancara kepada pihak yang berwenang dan terkait dalam BPR.

### 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari subyek penelitian. Data ini meliputi :

- a) Gambaran umum perusahaan
- b) Struktur organisasi
- c) Literatur – literatur yang berkaitan dengan penelitian

## 4. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara yaitu dengan mengadakan tanya jawab yang berkaitan dengan penelitian dengan pihak – pihak yang terkait dan berkompeten.

### b. Studi Pustaka

Literatur – literatur yang sudah ada dan data – data yang ada terkait dengan penelitian.

## 5. Teknik Pembahasan

Model pembahasan yang dilakukan dalam tugas akhir ini yang dilakukan oleh penulis adalah analisis Deskriptif Kualitatif atau



penelitian Deskriptif Kualitatif yaitu penelitian yang fokusnya untuk menjelaskan atau menggambarkan objek penelitian secara utuh berdasarkan data – data yang yang berhubungan dengan kinerja objek penelitian atau penelitian yang fokus untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain dan kemudian menjelaskan hubungan antar variabel tersebut secara ilmiah. (Prof. Dr. Sugiyono, 2004 : 11).

## F. PENELITIAN SEBELUMNYA

Tabel 1.1  
Penelitian Sebelumnya  
(Sumber : [www.google.com](http://www.google.com))

No	Nama Penulis dan Universitas	Judul Tulisan dan Tahun Tulisan	Hasil Penelitian / Kesimpulan
1	Mahrinasari MS Fakultas Ekonomi Universitas Lampung	Pengelolaan Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Bandar Lampung 2003	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pengalokasian volume kredit ditentukan oleh kinerja Likuiditas dan Rentabilitas.</li><li>- Pengalokasian volume kredit dipengaruhi negatif oleh rasio kas dan postif oleh LDR serta ROA sesuai dengan koefisien regresi masing – masing variabel.</li></ul>
2.	Cahyaning Pertiwi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Kredit Dan Likuiditas Terhadap Rentabilitas Usaha (Studi Kasus pada PD. BPR BKK di Kabupaten Kudus) 2007	<ul style="list-style-type: none"><li>- Secara umum likuiditas berpengaruh terhadap rentabilitas usaha</li><li>- Secara bersama-sama efektivitas pengendalian intern kredit dan likuiditas mempunyai pengaruh yang signifikan.</li></ul>
3	Laili Nurul Hayati Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang	Pengaruh Efektivitas Pengendalian Intern Kredit Dan Likuiditas Terhadap Rentabilitas pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (BPR BKK) Di Kabupaten Tegal 2005	<ul style="list-style-type: none"><li>- Secara umum likuiditas tidak berpengaruh terhadap rentabilitas.</li><li>- Secara bersama-sama atau simultan efektivitas pengendalian intern kredit dan likuiditas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan.</li><li>- Secara spesifik efektivitas pengendalian intern kredit tidak berpengaruh langsung terhadap rentabilitas</li></ul>

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. BANK PERKREDITAN RAKYAT**

##### 1. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat

Menurut Undang – undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998, pengertian dari Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR hanya menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau dana bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Status BPR diberikan kepada Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pith Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dengan memenuhi persyaratan tatacara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

##### 2. Asas Bank Perkreditan Rakyat

Dalam melaksanakan usahanya BPR berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati - hatian. Demokrasi ekonomi

adalah sistem ekonomi Indonesia yang dijalankan sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 yang memiliki 8 ciri positif sebagai pendukung dan 3 ciri negatif yang harus dihindari (free fight liberalisme, etatisme, dan monopoli).

### 3. Tugas Pokok Bank Perkreditan Rakyat

Diarahkan untuk menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan serta mengurangi praktek – praktek ijon dan para pelepas uang. Dengan semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat, tugas BPR tidak hanya ditujukan bagi masyarakat pedesaan, tetapi juga mencakup pemberian jasa perbankan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah di daerah perkotaan.

### 4. Usaha yang dapat dilakukan dan dilarang bagi Bank Perkreditan Rakyat

Yang dapat dilakukan adalah :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau

tabungan pada bank lain. SBI adalah sertifikat yang ditawarkan Bank Indonesia kepada BPR apabila BPR mengalami over likuiditas.

Kegiatan yang dilarang dilakukan oleh BPR :

- a. Menerima simpanan berupa giro
- b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
- c. Melakukan penyertaan modal dengan prinsip *prudent banking* dan *concern* terhadap layanan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah.
- d. Melakukan usaha perasuransian.
- e. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam usaha BPR.

#### 5. Alokasi Kredit BPR

Dalam mengalokasikan kredit, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh BPR, yaitu :

- a. Dalam memberikan kredit, BPR wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian.
- b. Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BPR kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan

dalam kelompok yang sama dengan BPR tersebut. Batas maksimum tersebut adalah tidak melebihi 30% dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

- c. Memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BPR kepada pemegang saham (dan keluarga) yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor, anggota dewan komisaris (dan keluarga), anggota direksi (dan keluarga), pejabat BPR lainnya, serta perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan pihak pemegang saham (dan keluarga) yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor, anggota dewan komisaris (dan keluarga), anggota direksi (dan keluarga), pejabat BPR lainnya. Batas maksimum tersebut tidak melebihi 10% dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

#### 6. Pengawasan Pembinaan BPR

Pengawasan Bank Indonesia terhadap BPR meliputi :

- a. Pemberian bantuan dan layanan perbankan kepada lapisan masyarakat yang rendah yang tidak terjangkau bantuan dan layanan bank umum, yaitu dengan memberikan pinjaman kepada pedagang/pengusaha kecil di desa dan di pasar agar tidak terjerat rentenir dan menghimpun dana masyarakat.

- b. Membantu pemerintah dalam ikut mendidik masyarakat guna memahami pola nasional dengan adanya akselerasi pembangunan.
- c. Penciptaan pemerataan kesempatan berusaha bagi masyarakat. Dalam melakukan pengawasan akan terjadi beberapa kesalahan, yaitu :
  - 1) Organisasi dan sistem manajemen, termasuk di dalamnya perencanaan yang ditetapkan.
  - 2) Kekurangan tenaga trampil dan profesional.
  - 3) Mengalami kesulitan likuiditas.
  - 4) Belum melaksanakan fungsi BPR sebagaimana mestinya (sesuai UU)

#### 7. Pendirian BPR dan Bentuk Hukum BPR

Pendirian BPR dapat dilakukan oleh :

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Badan Hukum Indonesia yang seluruh kepemilikannya oleh WNI.
- c. Pemerintah Daerah, atau
- d. Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam angka (1), (2), (3).

Sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia No. 32/35/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat dikatakan

bahwa modal disetor untuk mendirikan BPR ditetapkan sekurang –  
kurangnya sebesar :

- a. Dua milyar rupiah untuk BPR yang didirikan di DKI Jakarta dan Kabupaten/Kotamadya Tangerang, Bogor, bekasi dan Kerawang.
- b. Satu milyar rupiah untuk BPR yang didirikan di wilayah Ibukota Provinsi di luar wilayah yang disebut dalam huruf (a).
- c. Lima ratus juta rupiah untuk BPR yang didirikan di luar wilayah yang disebut dalam huruf (a) dan (b).

#### 8. Bentuk Hukum BPR

Bentuk hukum BPR dapat berupa Perusahaan Daerah (Badan Usaha Milik Daerah), Koperasi Perseroan Terbatas (berupa saham atas nama), dan bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

## **B. PERKREDITAN BPR**

### 1. Pengertian Kredit

Kredit berasal dari kata Italia, *credere* yang artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditor bahwa debiturnya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Intinya adalah bahwa kreditor percaya kredit yang diberikan tidak akan macet.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan ada beberapa unsur yang terdapat dalam kredit, yaitu :



- a. Kepercayaan, yaitu dimana kreditur mempunyai keyakinan bahwa kredit yang diberikan akan dikembalikan kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
- b. Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur ini terdapat nilai agio, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya yang akan diterima pada masa yang akan datang. Maka untuk itu diperlukan adanya jaminan sesuai dengan nilai kredit bahkan lebih.
- c. Prestasi, yang menjadi obyek kredit yaitu uang, barang atau jasa.
- d. Resiko.

## 2. Tujuan dan Fungsi Kredit

### Tujuan Kredit

- a. Memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit.
- b. Memanfaatkan dan memproduktifkan dana – dana yang ada.
- c. Melaksanakan operasional bank
- d. Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat.
- e. Memperlancar lalu lintas pembayaran.
- f. Menambah modal kerja perusahaan.
- g. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

## 3. Fungsi Kredit :

- a. Meningkatkan daya guna uang.
- b. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

- c. Meningkatkan daya guna dan peredaran uang.
- d. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi.
- e. Meningkatkan dan sebagai pemotivator dalam kegiatan perdagangan perekonomian.
- f. Meningkatkan pemerataan pendapatan.
- g. Meningkatkan hubungan internasional (L/C, CGI, dll)
- h. Mengubah cara berpikir/bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis.

#### 4. Jenis – Jenis Kedit yang Disalurkan

##### a. Berdasarkan Tujuan/Kegunaanya

- 1) Kredit Konsumtif, untuk kebutuhan rumah tangga debitur sendiri.
- 2) Kredit Modal Kerja, untuk menambah modal kerja suatu usaha.
- 3) Kredit Investasi  
Digunakan untuk pembelian barang-barang modal atau barang- barang tahan lama atau aktiva tetap.

##### b. Berdasarkan Jangka Waktu :

- 1) Kredit Jangka Pendek, paling lama satu tahun.
- 2) Kredit Jangka Menengah, waktunya antara satu sampai dengan tiga tahun.
- 3) Kredit Jangka Panjang, lebih dari tiga tahun.

c. Berdasarkan Macamnya

- 1) Kredit Askep, pinjaman uang biasa sebanyak plafond kreditnya.
- 2) Kredit Penjual, kredit yang diberikan penjual kepada pembeli, artinya barang telah diterima pembayaran kemudian. Misal : *Usance L/C*.
- 3) Kredit Pembeil, pembayaran telah dilakukan kepada penjual, tetapi barangnya diterima belakangan atau pembelian dengan uang muka. Misal, *red clause L/C*.

d. Berdasarkan Sektor Perekonomian

1) Kredit Pertanian.

Dengan tujuan produktif dalam rangka meningkatkan hasil atau produksi disektor pertanian, baik berupa kredit modal kerja maupun kredit investasi.

2) Kredit Perindustrian.

Kredit yang diberikan berkenaan dengan kegiatan usaha mengubah-ubah bentuk atau transformasi, meningkatkan faedah dengan mengolah baik secara mekanik maupun kimia, dari bahan sampai menjadi barang selesai

3) Kredit Pertambangan.

Untuk keperluan penggalian dan pengambilan bahan - bahan tambang.

- 4) Kredit Ekspor Impor
  - 5) Kredit Koperasi.
  - 6) Kredit Profesi.
- e. Berdasarkan Agunan/Jaminan
- 1) Kredit Agunan Orang.
  - 2) Kredit Agunan Efek, surat – surat berharga
  - 3) Kredit Agunan Barang.
  - 4) Kredit Agunan Dokumen, missal L/C.
- f. Berdasarkan Golongan Ekonomi
- 1) Golongan Ekonomi Lemah, seperti KUK, KUT.
  - 2) Golongan Ekonomi Menengah dan Kolongmerat.
- g. Berdasarkan Penarikan atau Pelunasan
- 1) Kredit Rekening Koran, dapat ditarik dan di lunasi setiap saat.
  - 2) Kredit Berjangka, kredit yang penarikannya sekaligus sebesar plafondnya.
- h. Berdasarkan sumber dananya
- 1) Kredit yang dananya berasal dari tabungan masyarakat.  
Pemberian kredit dilakukan karena adanya kelebihan dana masyarakat yang terbentuk dari kelebihan pendapatannya yang terkumpul melalui *saving deposit*.
  - 2) Kredit yang dananya berasal dari penciptaan uang baru.  
Kredit yang diberikan dengan dana dari penambahan uan terhadap uang yang beredar atau yang telah ada. Kredit tersebut

memberikan dampak penambahan daya beli baru yang bersumber kepada penciptaan uang tersebut.

## 5. Karakteristik dan Prinsip Dasar

### a. Karakteristik Kredit

Asset bank yang pengelolaannya dikuasakan kepada pihak lain (debitur).

### e. Prinsip Dasar Kredit

Yaitu prinsip kehati – hatian, terdiri dari :

- 1) *First Line Of Defence*, adanya sistem yang diyakini telah memenuhi prinsip keberhatian dan memenuhi kriteria GCG.
- 2) *Second Line Of Defence*, tersedianya SDM yang professional, bertintegritas, tinggi sehingga dapat dijamin sistem dan prosedur dipatuhi.
- 3) Selalu ada *Trade Off Service and Risk*, service (sistem dan prosedur) yang longgar akan meningkatkan resiko bagi bank. Sebaliknya servis yang ketat memperkecil resiko pada bank.

## 6. Kebijakan Perkreditan

Rencana kebijakan kredit dimaksudkan sebagai penyusunan segenap komponen yang mengatur perihal perkreditan bank, baik prosedur, jumlah kredit maupun jangka waktu dan tingkat bunga kredit yang disusun dan dijadikan pedoman bank melaksanakan penyaluran kredit kepada debitur. Kebijakan kredit bank yang komprehensif terdiri dari dari tiga bagian yaitu :

a) Kebijakan umum kredit

Kebijakan umum kredit menyangkut sasaran yang ingin dicapai, strategi pokok penyaluran kredit, daerah pemasaran, standar mutu kredit dan jaminan yang di kehendaki, dan batas wewenang persetujuan / pemberian kredit.

b) Prosedur pemberian dan pengawasan

Merupakan kebijaksanaan yang harus dipenuhi oleh bank dan calon debitur. Secara garis besar prosedur pemberian kredit menyangkut tiga persoalan yaitu, standar dokumentasi kredit, perlindungan melalui program asuransi dan pengawasan kredit. Maka untuk itu diperlukan Manajemen Kredit yang kegiatannya mengatur pemanfaatan dana – dana bank supaya produktif, aman, dan giro wajib minimumnya tetap sehat.

7. Penerapan Prinsip Kehati – Hatian dalam Perkreditan

Prinsip kehati – hatian tercermin dalam kebijaksanaan pokok perkreditan, tata cara dan prosedur penilaian kualitas kredit, profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan.

8. Prosedur Dalam Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang membedakan adalah prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dengan pertimbangan masing – masing. Prosedur pemberian

kredit secara umum dapat dibedakan antara perseorangan atau badan hukum dan di tinjau pula tujuannya untuk konsumtif atau produktif.

Prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut :

- a. Pengajuan Berkas - Berkas
- b. Penyelidikan Berkas Pinjaman
- c. Wawancara I
- d. *On The Spot* (Pemeriksaan Lapangan)
- e. Wawancara ke II
- f. Keputusan Kredit
- g. Penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya.
- h. Realisasi Kredit
- i. Penyaluran atau Penarikan Dana

Sedangkan secara umum adalah :

- a. Permohonan Kredit atau Prakarsa
- b. Analisis Berkaitan dengan latar belakang pemohon, tujuan dari kredit, riwayat hubungan bisnios dengan bank dan analisis 5C.
- c. Perhitungan Kebutuhan Kredit
- d. Mencakup perhitungan Kredit Modal Kerja dan Kredit Konsumtif.
- e. Negoisasi Kredit, adalah diskusi tentang suatu permasalahan kredit yang terjadi antara pihak bank dan pemohon, dalam rangka mencapai kesepakatan mengenai penyusunan arus kas pemohon, kelengkapan dokumen, struktur dan tipe kredit serta syarat – syarat kredit yang harus dipenuhi pemohon.

f. Pemberian Rekomendasi Kredit

Merupakan suatu kesimpulan dari analisis dan evaluasi atas proposal kredit. Rekomendasi harus secara jelas menguraikan kelemahan dan kekuatan yang akan mempengaruhi kemampuan pemohon untuk memenuhi angsuran yang telah dijadwalkan.

g. Pemberian Putusan kredit

h. Dokumentasi dan Administarsi Kredit

Dokumentasi kredit adalah seluruh dokumen yang diperlukan dalam rangka pemberian kredit yang merupakan bukti perjanjian/ikatan hukum antara bank dan nasabah yang merupakan perbuatan hukum atau mempunyai akibat hukum.

Administrasi kredit bertujuan untuk mendukung langkah – langkah pembinaan atau penilaian atas perkembangan kredit yang telah diberikan atau perkembangan usaha nasabah dan pengawasan kredit, sehingga kepentingan bank terlindungi.

i. Pengawasan Kredit dan Pembinaan Kredit

Pengawasan kredit adalah kegiatan pengawasan/monitoring terhadap tahap – tahap proses pemberian kredit. Untuk lebih mengefektifkan pengawasan kredit, dibentuk system pengendalian intern perkreditan yang bertujuan mencapai portofolio kredit yang sehat serta menghindarkan kemungkinan timbulnya penyalahgunaan wewenang oleh berbagai pihak yang dapat merugikan bank dan terjadinya praktek pemberian kredit yang tidak sehat.



Sistem pengendalian intern perkreditan meliputi kebijaksanaan perkreditan, organisasi perkreditan, dan prosedur perkreditan. Pembinaan kredit adalah upaya pembinaan yang berkesinambungan (mulai sejak pencairan kredit sampai dengan kredit di bayar lunas termasuk pemecahan masalahnya) dan dilakukan oleh pejabat kredit yang berwenang terhadap fasilitas kredit yang menyangkut penilaian usaha pengembangan debitur, penggunaan kredit maupun perlindungan kepentingan bank, baik secara administrasi maupun di lapangan (*on the spot*).

#### 9. Prinsip – Prinsip Pemberian Kredit

Dalam pemberian Kredit, ada beberapa prinsip yang di terapkan oleh bank sebelum bank memutuskan untuk pemberian kredit, prinsip ini di kenal dengan istilah 5C, yaitu :

##### a. *Character*

Penilaian karakter atau watak kepribadain calon debitur ini dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik dari calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan kredit yang dipinjamkan. Informasi yang berkaitan dengan karakter ini dapat diperoleh terutama didasrakan kepada hubungan yang telah terjalin antara bank dan caoIn debitur ataupun dari pihak lain.

##### b. *Capacity*.

Capacity atau Kapasitas yang dimaksud adalah kemampuan seorang debitur untuk mengembalikan pinjamanya.untuk

mengukurnya, bank harus meneliti tentang keahlian calon debitur dalam usahanya dan kemampuan dalam manajerialnya, sehingga bank yakin dan tahu pasti bahwa usaha yang akan dibiayai dikelola oleh orang yang tepat dan mampu mengembalikan pinjamannya.

c. *Capital*

*Capital* atau Modal, dapat dilihat semakin banyak modal yang ditanamkan oleh debitur, maka debitur dipandang serius dalam menjalankan usahanya. sehingga yang dilihat oleh baik yang lalu ataupun yang akan datang, khususnya untuk melihat besar kecilnya *capital* dapat dilihat pada neraca perusahaan komponen “*Owner Equity*”, laba yang ditahan dan lain lainnya.

d. *Collateral*

Jaminan atau agunan yang disertakan pada saat meminjam kredit yang nilai jaminannya berkualitas tinggi dan mudah dicairkan dan nilainya minimal sebesar jumlah kredit yang diberikan.

Selain itu, manfaat *collateral* ini adalah sebagai alat pengamanan apabila usaha yang dibiayai gagal atau ada sebab dimana debitur tidak bisa melunasi kreditnya dan apabila ada ketidakpastian kurun waktu debitur harus melunasi kredit. Dalam penilaian *collateral* ini ditinjau dari 2 sudut yaitu berdasarkan nilai ekonomisnya dan nilai yuridisnya.

e. *Condition Of Economic*

Yaitu situasi dan kondisi politik, social, ekonomi, budaya dan lain – lain yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat yang kemungkinan keadaan tersebut akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang diberikan kredit.

Selain menrapkan prinsip 5C, bank juga menerapkan prinsip 5P yang terdiri dari :

a. *Party* (Para Pihak)

Yaitu ada kreditur dan calon debitur.

b. *Purpose* (Tujuan)

Untuk apa kredit tersebut digunakan dan apabila perlu juga diadakan pengawasan supaya kredit tersebut digunakan untuk tujuan yang telah ada.

c. *Payment* (Pembayaran)

Diperhatikan sumber pembayaran kredit dari debitur berapakah mampu mengembalikan kredit atau tidak.

d. *Profitability* (Perolehan Laba)

Kreditur melihat apakah laba yang akan diperoleh perusahaan lebih besar dari bunga pinjaman dan apakah pendapatan perusahaan dapat menutupi pembayaran kembali kredit, *cash flow*.

e. *Protection* (Perlindungan)

Perlindungan terhadap kredit dari perusahaan debitur.

Dan prinsip pemberian kredit selanjutnya yang diterapkan oleh bank disebut 3 R, yang terdiri dari :

a. *Returns* (Hasil yang Diperoleh) hasil yang diperoleh dari kredit yang telah dimanfaatkan dan dapat diantisipasi oleh calon debitur apakah mampu mengembalikan kredit beserta bunga atau tidak.

b. *Repayment* (Pembayaran Kembali)

Apakah kemampuan bayar dari pihak debitur *match* dengan *schedule* pembayaran kembali.

c. *Risk Bearing Ability* (Kemampuan Menanggung Resiko)

Kemampuan debitur dalam menanggung apabila terjadi resiko, misal apabila terjadi kredit macet.

10. Kebijakan Perkreditan Bank

Kebijakan perkreditan bank harus diprogram dengan baik dan benar,. Program perkreditan harus didasarkan pada asas yuridis, ekonomis, dan kehati – hatian, dan yang dimaksud adalah :

a. Yuridis, yang dimaksud adalah program perkreditan harus sesuai dengan undang – undang perbankan dan ketetapan Bank Indoneia.

b. Ekonomis, artinya menetapkan rentabilitas yang ingin dicapai dan tingkat bunga kredit yang disalurkan.

- c. Kehati – hatian, besar plafond kredit (*legal lending limit* = BMPK) harus ditetapkan atas hasil analisis yang baik dan obyektif berdasarkan asas 5C, 7P dan 3R dari setiap calon peminjam.

Kebijaksanaan (policy) adalah suatu pedoman yang menyeluruh, baik lisan maupun tulisan yang memakan dilakukan. memberikan suatu batas umum dan arah tempat *management action*.

Kebijakan Perkreditan antara lain :

- a. *Bankable*, artinya kredit yang akan di. biyai hendaknya memenuhi criteria :
  - 1) *Safety*, yaitu dapat diyakini kepastian pembayaran kembali kredit sesuai dengan jadwal dan jangka waktu kredit
  - 2) *Effectiveness*, artinya kredit yang diberikan benar – benar digunakan untuk pembiayaan, sebagaimana dicantumkan dalam proposal kreditnya.
- b. Kebijakan investasi merupakan penanaman dana yang selalu dikaitkan dengan sumber dana bersangkutan. Investasi dana ini disalurkan dalam bentuk investasi primer dan investasi, kebijaksanaan resiko, kebijaksanaan penyebaran kredit dan kebijaksaam tingkat bunga..
- c. Kebijakan Resiko, maksudnya adalah dalam penyaluran kredit harus memperhitungkan secara cermat indikator yang dapat

menyebabkan resiko macetnya kredit dan menetapkan cara – cara penyelesaiannya.

- d. Kebijakan Penyebaran Kredit, maksudnya adalah kredit harus disalurkan kepada beraneka ragam sector ekonomi, semua golongan ekonomi, dan dengan jumlah peminjam yang banyak.
- e. Kebijakan Tingkat Bunga, maksudnya adalah dalam pemberian kredit harus memperhitungkan situasi moneter, kondisi perekonomian, persaingan antar bank, dan tingkat inflasi untuk menetapkan besarnya suku bunga kredit.

### **C. PENGERTIAN PENGELOLAAN KREDIT DAN TUJUAN PENGELOLAAN KREDIT**

Pengelolaan Kredit adalah usaha – usaha untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif dan tidak macet (Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan 2008 : 105)

Adapun tujuan dari pengelolaan kredit adalah :

- a. Menjaga kredit yang disalurkan tetap aman.
- b. Mengetahui apakah kredit yang disalurkan itu lancar atau tidak.
- c. Melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaian kredit macet atau kredit bermasalah.
- d. Mengevaluasi apakah prosedur penyaluran kredit yang dilakukan telah baik atau masih perlu disempurnakan.
- e. Memperbaiki kesalahan – kesalahan karyawan analisis kredit dan

mengusahakan agar kesalahan itu tidak terulang lagi.

- f. Mengetahui proses persentase *collectability credit* yang disalurkan bank.
- g. Meningkatkan moral dan tanggung jawab karyawan analisis kredit bank.

#### Kolektibilitas Kredit

- a. Kolektibilitas A atau Lancar

Adalah debitur selalu membayar kewajibannya secara lancar dan tidak pernah melakukan penunggakan berturut – turut selama 3 bulan.

- b. Kolektibilitas B atau Kurang Lancar

Adalah kredit yang selama 3 bulan berturut – turut kewajibannya tidak dibayar oleh debitur maka kredit digolongkan tidak lancar.

- c. Kolektibilitas C atau Diragukan

Adalah kredit yang selama 6 bulan berturut - turut Kewajibannya tidak dibayar debitur sehingga kredit digolongkan macet.

- d. Kolektibilitas D atau Macet

Adalah kredit yang termasuk piutang ragu – ragu karena agunannya telah disita bank, tetapi tidak cukup membayar utangnya.

#### 1. *Repressive Control OF Credit*/Penyelesaian Kredit Macet

Yang dimaksud dengan penyelamatan adalah dilihat dari kolektibilitas dari debitur yang tergolong menjadi lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Untuk debitur yang kolektibilitasnya

masuk kedalam golongan diragukan dan macet selanjutnya pihak bank akan mengadakan tindakan penyelamatan (*rescue operation*), dan dapat dilakukan dengan cara :

a. *Rescheduling*

Berkaitan dengan jangka waktu kredit sehingga debitur mendapatkan keringanan, yaitu :

- 1) Memperpanjang waktu kredit.
- 2) Memperpanjang jarak waktu angsuran.
- 3) Penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu kredit.

b. *Reconditioning*, yaitu adanya keringanan atau perubahan persyaratan kredit, antara lain :

- 1) Kapitalisasi Bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok sehingga nasabah untuk waktu tertentu tidak perlu membayar bunga, tetapi nanti uang pokoknya dapat melebihi plafond yang disetujui.
- 2) Penundaan Pembayaran Bunga, yaitu bunga tetap dihitung tetapi untuk penagihan atau pembebananya kepada nasabah tidak dilaksanakan sampai nasabah mempunyai kesanggupan. Atas bunga yang terutang tersebut tidak dikenakan bunga dan tidak menambah plafon kredit.



- 3) Penurunan Suku Bunga, dalam hal nasabah dinilai masih mampu membayar bunga pada waktunya, tetapi suku bunga yang dikenakan terlalu tinggi untuk aktivitas dan hasil usaha pada waktu itu. Cara ini ditempuh apabila hasil operasi debitur memang menunjukkan surplus/laba dan likuiditas memungkinkan untuk membayar bunga.
  - 4) Pembebasan Bunga, ini dilakukan apabila debitur tidak sanggup membayar bunga karena usaha debitur hanya mencapai tingkat kembali pokok (*break even*). Dan sifatnya bisa sementara, selamanya dan seluruh utang bunga.
  - 5) Pengkonversian kredit jangka pendek menjadi kredit jangka panjang dengan syarat lebih ringan.
- c. *Restructuring*, dilakukan apabila kesulitan usaha debitur dikarenakan faktor modal. Dan *restructuring* ini dilakukan dengan meninjau kembali situasi dan kondisi permodalan. Baik modal untuk keperluan modal kerja atau modal berupa barang – barang modal.

Tindakan yang dapat diambil dalam rangka *Restructuring* :

- 1) Tambahan Kredit (*Injection/Nursery Operation*), apabila debitur mengalami kekurangan modal kerja.

- 2) Tambahan *Equity*, apabila tambahan kredit membentakan nasabah sehubungan dengan pembayaran bunga maka dapat dipertimbangkan tambhan modal sendiri berupa tambahan modal dari pihak bank atau dari pemilik.
- 3) Kombinasi, dapat digabungkannya *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*.
- 4) *Liquidation*, adalah penjualan barang – barang yang dijadikan agunan dalam rangka pelunasan utang.

#### **D. LIKUIDITAS**

##### **1. Pengertian Likuiditas**

Likuiditas secara umum kita ketahui sebagai salah satu penilaian kesehatan bank, dimana bank harus mampu untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Menurut Wahdi, S.E yang dimaksud dengan likuiditas adalah sebagai perbandingan antara jumlah uang tunai dan aktiva lain yang dapat disamakan dengan uang tunai di satu pihak dengan jumlah uang lancar dipihak lain. Makin besar perbandingan tersebut, makin likuid perusahaan dan begitu pula sebaliknya. Likuiditas bank diartikan sebagai kemampuan penyediaan alat – alat likuid yang mudah ditunaikan guna memenuhi semua kewajiban bank yang segera harus dibayar.

Sedangkan menurut Drs. H. Malaya S.P. Hasibuan, Likuiditas adalah semua kemampuan bank untuk membayar utang jangka pendeknya dengan alat – alat likuid yang dikuasainya.

Pendapat lain menurut Munawir (dalam H. Malaya S.P. Hasibuan, 2001) likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memnuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk memnuhi kewajiban saat ditagih.

Bank dikatakan likuid jika bank tersebut mempunyai :

- a. *Cash asset* sebesar kebutuhan yang akan digunakan untuk memenuhi likuiditasnya.
- b. *Cash asset* lebih kecil dari butir (1) di atas, tetapi nbank juga mempunyai asset lainnya (khususnya surat – surat berharga) yang dapat dicairkan sewaktu – waktu tanpa mengalami penurunan nilai pasarnya.
- c. Kemampuan untuk menciptakan cash asset baru melalui berbagai bentuk utang,

Dalam terminologi yang hampir sama, dapat disebutkan bahwa likuiditas adalah kemampuan bank untuk menyediakan saldo kas dan saldo harta likud yang lain untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, khususnya uuntuk :

- a. Menutup jumlah *reserves required*

- b. Membayar cek, giro berbunga, tabungan dan deposito berjangka milik nasabah yang diuangkan kembali
- c. Menyediakan dana kredit yang diminta calon debitur sehat, sebagai bukti bahwa mereka tidak menyimpang dari kegiatan utama bank yaitu pemberian kredit;
- d. Menutup berbagai macam kewajiban segera lainnya;
- e. Menutup kebutuhan biaya operasional perusahaan.

## 2. Jenis dan Sumber Alat Likuid

Menurut terminologi yang berlaku umum dalam dunia perbankan, dapat disebutkan bahwa jenis-jenis alat likuid yang dimiliki oleh bank adalah :

- a. Kas atau uang tunai (kertas dan logam) yang tersimpan dalam brankas (khasanah) bank tersebut;
- b. Saldo dana milik bank tersebut yang terdapat pada Bank Sentral (Saldo Giro BI);
- c. Tagihan atau deposito pada bank lain, termasuk bank koresponden;
- d. Cek yang diterima, tetapi masih dalam proses penguangan pada Bank Sentral dan bank koresponden.

Dalam dunia perbankan, keempat jenis alat/ harta likuid tersebut sering disebut “posisi uang” (*money position*) bank yang bersangkutan pada saat tertentu.

Adapun menurut sumbernya, suatu bank dapat memperoleh alat-alat likuid yang diperlukan tersebut diatas dari berbagai sumber, yaitu :

a. Asset bank yang akan segera jatuh tempo :

Kredit pinjaman kepada debitur atau cicilan pinjaman yang akan jatuh tempo dapat dianggap sebagai sumber likuiditas. Oleh karena itu, dalam kondisi kebijakan uang ketat, posisi likuiditas suatu bank akan rawan apabila keseluruhan portofolio kreditnya masuk kategori *evergreen*. Surat-surat berharga, instrumen pasar uang seperti Bank Acceptance, Sertifikat Bank Indonesia, dan sertifikat deposito pada Bank lain yang akan segera jatuh tempo, dapat pula dianggap sebagai sumber likuiditas dalam golongan ini.

b. Pasar Uang

Pasar uang adalah sumber likuiditas bank. Namun harus diakui bahwa tidak setiap bank mempunyai kemampuan untuk masuk ke pasar uang. Hal ini sangat dipengaruhi oleh besarnya suatu bank dan persepsi pasar uang atas *Credit Worthiness* bank tersebut. Dalam hal ini, para investor yang meminjamkan uangnya ke bank akan melakukan analisa yang mendalam dan selektif terhadap tingkat dan konsistensi perkembangan pendapatan bank, kualitas asset, reputasi kesehatan manajemen, dan kekuatan modal bank.

### 3. Sindikasi kredit

Pembentukan sindikasi kredit, selain bertujuan menyasiasi *legal lending limit* (3L) dan menyebarkan risiko, juga bertujuan untuk menjalin hubungan dengan bank-bank lain. Dengan demikian, ketika mengalami kesulitan likuiditas maka bank tersebut dapat menyidikasi sebagian portofolio kreditnya kepada bank lain untuk mengatasi masalah tersebut.

### 4. Cadangan likuiditas

Khususnya bank yang tidak dapat segera memperoleh dana pada saat diperlukan, bank tersebut biasanya membentuk cadangan likuiditas. Cadangan likuiditas biasanya dibentuk dengan cara memelihara saldo Kas dan Giro BI pada batas maksimal yang diperbolehkan.

### 5. Sumber dana yang sifatnya *Last Resort*

Salah satu sumber likuiditas yang sifatnya *last resort*, yang umum digunakan oleh kebanyakan bank adalah fasilitas *line of credit* dari bank lain. Bank yang menjalin hubungan koresponden dengan bank lain kemungkinan dapat meminta fasilitas *stand by line of credit* dari bank korespondennya tersebut. Selain itu, Bank Sentral bertindak sebagai *leader of last resort* untuk dunia perbankan atau lembaga keuangan bukan bank. Namun bantuan dana dari bank sentral biasanya baru akan dimanfaatkan oleh bank yang kesulitan likuiditas apabila sumber-sumber likuiditas lainnya tidak cukup untuk mengatasi kesulitan likuiditas yang dialaminya

## 6. Prinsip Pengelolaan Likuiditas

Metode dan cara pengelolaan likuiditas yang diterapkan oleh masing-masing bank secara praktis akan saling berbeda, tergantung kepada metode manajemen dana yang diterapkan dan garis kebijakan dalam pengelolaan likuiditas. Namun demikian, terdapat kesamaan dalam prinsip-prinsip mendasar yang menjadi bingkai (*frame work*) pengelolaan likuiditas.

Pengelolaan likuiditas harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang ada. Oleh karena itu dalam pengelolaan likuiditas bank perlu diperhatikan beberapa prinsip pengelolaan likuiditas yaitu :

- a. Bank harus memiliki sumber dana inti (*core source of fund*) yang sesuai dengan dengan sifat bank yang bersangkutan maupun pasar uang dan sumber dana yang ada dimasyarakat, serta yang cocok pula dengan mekanisme pengumpulan dana yang berlaku ditempat bank tersebut berada.
- b. Bank harus mengelola sumber-sumber dana maupun penempatan dengan hati-hati. Oleh karena itu harus diperhatikan komposisi sumber dana jatuh waktu berdasarkan jumlah masing-masing komposisi, tingkat suku bunga, faktor-faktor kesulitan dalam pengumpulan dana, produk-produk dana yang dimiliki dan sebagainya.

- c. Bank harus diperhatikan *different price for different customer* didalam penempatan dananya. Dan *price* (tingkat suku bunga) tersebut harus diatas tingkat suku bunga dana yang dipakainya, atau dengan kata lain, tingkat suku bunga atas penempatan dana tersebut harus bersifat *floating*.
- d. Bank harus menaruh perhatian terhadap umur sumber dananya kapan akan jatuh waktu, jangan sampai terjadi *maturity gap* dengan penempatannya (*placement*). Oleh karena itu perlu diperhatikan prinsip pemenuhan kebutuhan dana yang sering menjadi acuan, yaitu :
- 1) Kebutuhan dana jangka pendek harus dipenuhi dengan sumber-sumber dana jangka pendek.
  - 2) Kebutuhan dana jangka panjang harus dipenuhi dengan sumber-sumber dana jangka panjang.
- e. Bank harus waspada bahwa tingkat suku bunga dana tersebut selalu berfluktuasi, naik turun dengan gerak yang sukar ditebak sebelumnya (*volatile*). Oleh karena itu, agar bank tidak kehilangan sumber dananya karena nasabah pindah ke bank lain maka bank harus memiliki *pricing policy* yang baik, disamping harus mempunyai marketing strategi yang minimal mencakup strategi dibidang :
- 1) *Product Quality*
  - 2) *Product Placement*
  - 3) *Promotion*
  - 4) *Product Pricing*



5) *Power*

6) *Public Relation*

f. Bank harus secara terkoordinasikan apabila akan menanamkan sumber sumber dananya ke aktiva. Sesuai ketentuan perbankan yang ada saat ini, ekspansi aktiva suatu bank akan dibatasi oleh faktor-faktor :

a) Aktiva tertimbang menurut risiko (*Risk Weighted Asset*).

b) *Capital Adequancy Ratio (CAR)*

c) *Net Open Position (NOP)*

d) *Loan to Deposit Ratio (LDR)*

e) Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau *Legal Lending Limit*.

f) *Persentase Kredit Usaha Kecil (KUK)* harus lebih besar dari 20%.

7. Tujuan dan Manfaat Pengelolaan Likuiditas.

Pengelolaan likuiditas merupakan faktor yang sangat penting dalam operasional perbankan, bahkan sangat menentukan bagi kemampuan suatu bank untuk bertahan dan berkembang dalam persaingan usaha yang makin kompetitif. Tujuan dan manfaat dari pengelolaan likuiditas suatu bank secara garis besar adalah :

a. Untuk menurunkan serendah mungkin biaya dana, hal ini dapat dilakukan dengan cara memilih komposisi sumber dana yang akan memberikan biaya yang paling rendah. Beberapa alternatif yang tersedia adalah :

- 1) Dari dalam negeri versus dana luar negeri, atau dana rupiah versus dana valuta asing.
  - 2) Dana-dana jangka pendek versus dana-dana jangka panjang, atau dana dari pasar uang (*money market*) versus obligasi ataupun deposito jangka panjang.
  - 3) Dana sendiri (modal) versus dan dari pihak ketiga, atau Dana dengan biaya deviden versus dana dengan biaya bunga.
- b. Untuk memenuhi ketentuan sumber dana yang diperlukan bank di dalam pemberian kredit, penanaman dana dalam valuta asing, penanaman dana dalam surat-surat berharga, dan penanaman dana dalam aktiva tetap maupun untuk memenuhi kebutuhan modal sehari-hari.
- c. Untuk memenuhi kebutuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan otoritas moneter (bank sentral) di dalam menjaga likuiditas minimum, misalnya untuk memenuhi *legal reserve requirement*, dan untuk memenuhi *standar loan to deposit ratio* yang sehat.
8. Metode dan Pendekatan dalam Pengelolaan Likuiditas Bank.

Secara umum, metode yang digunakan oleh manajemen perbankan dalam menetapkan policy likuiditasnya berbeda antara suatu bank dengan bank lainnya, yang sangat dipengaruhi oleh pertimbangan kehati-hatian (*prudential*) maupun tujuan pencapaian pendapatan optimal. Pendekatan yang dapat ditempuh oleh manajemen bank dalam

menetapkan kebijakan likuiditasnya secara umum dapat dibagi menjadi lima pendekatan, yaitu :

- a. *Self liquidating approach*. Yaitu pendekatan peningkatan likuiditas bank melalui peningkatan pembayaran kembali kredit dan penanaman dalam surat-surat berharga, sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Dengan cara demikian aktiva-aktiva tersebut dapat digunakan sebagai alat likuid, khususnya untuk membiayai permintaan kredit baru ataupun diinvestasikan kembali dalam surat-surat berharga.
- b. *Asset Sale Ability* atau *Asset Shift Ability*, yaitu meningkatkan likuiditas dengan cara melakukan likuidasi (penjualan) terhadap asset-asset lainnya yang tidak produktif.
- c. *New Fund*, yaitu meningkatkan likuiditas dengan menciptakan sumber-sumber dana yang baru, baik dari masyarakat maupun dari dunia perbankan, misalnya menciptakan *Traveller Check*, *Credit Card*, deposito-deposito berjangka dan lain-lain.
- d. *Borrowers Earning Flow*, yaitu meningkatkan likuiditas melalui usaha yang lebih giat dalam menjaga kelancaran penerimaan angsuran dan bunga dari kredit yang diberikannya.
- e. *Reserve Discount Window to Central Bank As lender of Last Resort*, yaitu meningkatkan likuiditas dengan jalan mengadakan pinjaman kepada Bank Sentral sebagai pemberi pinjaman yang terakhir.

Sebelum menentukan pilihan tentang pendekatan mana yang akan ditempuh dalam kebijakan likuiditas suatu bank, manajemen bank sebaiknya melakukan analisis yang dikenal dengan istilah *A Three – Step Liquidity Planning and Analysis System*, sebagai berikut :

- 1) Langkah pertama – klasifikasi liabilities dan Capital apakah tergolong sebagai sumber dana yang *Reliable* (dapat diandalkan) ataukah *Volatile* (mudah menguap).
- 2) Langkah kedua – Klasifikasikan assets apakah sebagai alat yang likuid atau tidak likuid.
- 3). Langkah ketiga – bandingkan volume asset likuid dengan volume dan yang *volatile*. Perbandingan maksimum adalah 1,0 karena pada posisi ini akan dicapai apa yang disebut *balance liquidity position*, yaitu keadaan dimana permintaan alat-alat likuid sama besarnya dengan alat likuid yang tersedia pada bank.

#### 9. Alat-Alat Pengukuran Likuiditas

Secara akuntansi keuangan atau perbankan, perhitungan atau pengukuran likuiditas dapat dilakukan melalui perhitungan ratio yang menggambarkan hubungan timbal balik antara asset dengan liabilities. Adapun rumus-rumus perhitungan ratio likuiditas yang sering dipergunakan adalah sebagai berikut :

$$a. \text{ Quick Ratio} = \frac{\text{Cash Asset}}{\text{Total Deposit}}$$

Ratio ini menunjukkan kemampuan bank untuk membayar kembali simpanan para nasabahnya dengan alat-alat yang paling likuid yang dimiliki bank tersebut. Ratio ini sering disebut sebagai *Quick Ratio*.

$$b. \text{ Loan To Aseet Ratio} = \frac{\text{Total loans}}{\text{Total Aset}}$$

Ratio ini menunjukkan kemampuan bank dalam memenuhi permintaan kredit melalui jaminan sejumlah harta yang dimiliki.

$$c. \text{ Banking Ratio (LDR)} = \frac{\text{Total Loans}}{\text{Total Deposit}}$$

Banking Ratio digunakan untuk mengukur kemampuan bank untuk membiayai pemberian pinjaman dengan menggunakan dana yang dihimpun dari para nasabah/pihak ketiga. *Banking Ratio* ini mempunyai nama istilah lain yaitu *Loan to Deposit Ratio*.

LDR merupakan salah satu indikator kesehatan likuiditas bank. Penilaian likuiditas merupakan penilaian terhadap kemampuan bank untuk memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan kecukupan manajemen risiko likuiditas. LDR paling sering digunakan oleh analis keuangan dalam menilai suatu kinerja bank terutama dari seluruh jumlah kredit yang diberikan oleh bank dengan dana yang diterima oleh bank.

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tingkat Likuiditas bank di anggap sehat apabila LDRnya antara 85% - 110%

$$d. \text{ Cash Ratio} = \frac{\text{Liquidity Assets}}{\text{Short term borrowing}}$$

Cash ratio adalah ratio yang menunjukkan kemampuan bank untuk melunasi kewajiban-kewajiban yang harus segera dibayar dengan alat-alat likuid yang dimilikinya.

- e. NPL (*Non Performing Loan*)  
NPL merupakan salah satu indikator kesehatan kualitas aset bank. NPL yang digunakan adalah NPL neto yaitu NPL yang telah disesuaikan. Penilaian kualitas aset merupakan penilaian terhadap kondisi aset Bank dan kecukupan manajemen risiko kredit.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, semakin tinggi nilai NPL (diatas 5%) maka bank tersebut tidak sehat. NPL yang tinggi menyebabkan menurunnya laba yang akan diterima oleh bank. Penurunan laba mengakibatkan dividen yang dibagikan juga semakin berkurang sehingga pertumbuhan tingkat return saham bank akan mengalami penurunan.

#### 10. Manajemen Likuiditas

Dan di dalam likuiditas ini diperlukannya suatu manajemen likuiditas yang dapat mengatur dan menjalankan alat – alat likuidnya.

Manajemen Likuiditas adalah kegiatan mengatur penyediaan alat – alat likuid yang dibutuhkan bank agar posisi giro wajib minimumnya baik yuridis maupun ekonomis tetap baik dan benar.

Tujuan adanya manajemen Likuiditas :

- a. Menjaga posisi likuiditas bank agar selalu berada pada posisi yang ditentukan oleh bank sentral yaitu Bank Indonesia.
- b. Mengelola alat-alat likuid agar selalu dapat memenuhi semua kebutuhan *cash flow*, termasuk kebutuhan yang tidak diperkirakan, misalnya penarikan yang tiba-tiba terhadap sejumlah giro atau deposito berjangka yang belum jatuh tempo
- c. Sedapat mungkin memperkecil adanya *idle funds*.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. GAMBARAN OBJEK PENELITIAN**

##### a. Sejarah Perkembangan Perusahaan

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan salah satu Lembaga Keuangan Bank tetapi berbeda dengan Bank Umum lainnya. Perbedaan BPR dengan bank umum adalah pada produknya yaitu pada Bank Umum terdapat giro sedangkan pada BPR tidak terdapat giro.

PT. BPR Grogol Joyo berlokasi di Jalan Raya Solo Baru, Kompleks Plaza HB 01, Solo Baru, Grogol, Sukoharjo. Didirikan oleh Yusak Kereh, Koentjahjono Tanto dan Drs. Himananya Jonathan. Ide unuk mendirikan perusahaan atau PT.BPR ini adalah setelah melihat peluang dimana kegiatannya adalah membantu memberikan modal kerja bagi para wiraswasta atau usahawan yang masih potensial untuk mengembangkan usahanya. Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 1992 dihadapkan pada Notaris Pujiastuti, S.H. di Karanganyar, Akte Pendirian Bank Perkreditan Rakyat ini dibuat dan dicatat dengan Akte No. 15 Tanggal 23 April 1993. Berdasarkan hal tersebut maka resmilah PT.BPR Grogol Joyo didirikan. Dan sebagai Dewan Komisarisnya adalah Yusak Kereh, Koentjahjono, dan Drs. Himayana Jonathan.



Di dalam akte pendirian tersebut, disebutkan bahwa untuk modal dasar dalam pendirian ini sebesar Rp 500.000.000,00. Sedangkan untuk modal disetor adalah Rp 300.000.000,00 termasuk saham – saham PT.BPR Grogol Joyo, selain itu juga harus melengkapi beberapa persyaratan lainnya seperti :

1. Ijin Menteri Keuangan RI No.5.692/MK.17/1992 tanggal 17 Desember 1992
2. Ijin Usaha Keputusan Menteri Keuangan RI No.41 Kep. 144/KM/17/1992 tanggal 16 Juli 1998
3. Surat Ijin Tempat Usaha dari PEMDA Sukoharjo No.507/6034/93 tanggal 3 Juli 1998

Setelah persyaratan tersebut terpenuhi, maka pada tanggal 5 Agustus 1998 dimulailah kegiatan operasional dari PT. BPR Grogol Joyo sampai dengan sekarang.

b. Tujuan PT. BPR GROGOL JOYO

Adapun tujuan pokok didirikannya PT.BPR Grogol Joyo antara lain :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka.
2. Memberikan kredit kepada pengusaha/masyarakat umum.
3. Menunjang kelancaran penyedia sarana produksi, terutama permodalan.
4. Menciptakan pemerataan kesempatan berusaha bagi pengusaha ekonomi lemah.

5. Mendorong masyarakat agar gemar menabung melalui Tabungan Joyo dan Deposito Berjangka.
  6. Menumbuhkan perkembangan wiraswasta di pedesaan, sehingga secara tidak langsung membuka lapangan pekerjaan.
- c. Visi dan Misi I PT.BPR GROGOL JOYO
- Visi : Menjadi BPR yang sehat dan terpercaya.
- Misi : Menjadi BPR pilihan masyarakat dengan produk – produk yang terbaik dan layanan yang terbaik.
- d. Divisi Tempat Magang

Pada setiap perusahaan pasti memiliki beberapa divisi atau bagian dalam membantu kegiatan perusahaan. Sama dengan halnya Lembaga Keuangan Bank yaitu Bank Perkreditan Rakyat khususnya PT,BPR Grogol Joyo juga memiliki beberapa divisi atau bagian pokok untuk mendukung kegiatan BPR tersebut, diantaranya adalah :

#### 1. Divisi Marketing dan Remedial

Merupakan divisi yang menangani atau berkaitan dengan pemasaran produk baik funding ataupun lending dari BPR tersebut dan selain juga itu bagian remedial dimana menangani masalah bagi mereka yaitu nasabah yang tidak lancar dalam pembayaran angsuran kredit.

## 2. Divisi Kredit

Merupakan divisi yang berkaitan dengan kredit yang akan diberikan pada masyarakat. Selain itu juga yang melayani permohonan sampai dengan persetujuan pengajuan kredit yang dilakukan calon debitur. Dalam divisi ini juga berkaitan dengan adanya perjanjian kredit dan survey/analisis layak atau tidak layak calon debitur itu untuk diberikan pinjaman. Di divisi ini pula yang berkaitan dengan perjanjian kredit dan pengikatannya melalui barang jaminan baik BPKB atau Sertifikat Hak Milik.

## 3. Divisi Operasional

Divisi Operasional berkaitan dengan kegiatan BPR setiap harinya terutama yang berkaitan dengan kegiatan operasional keuangan BPR.

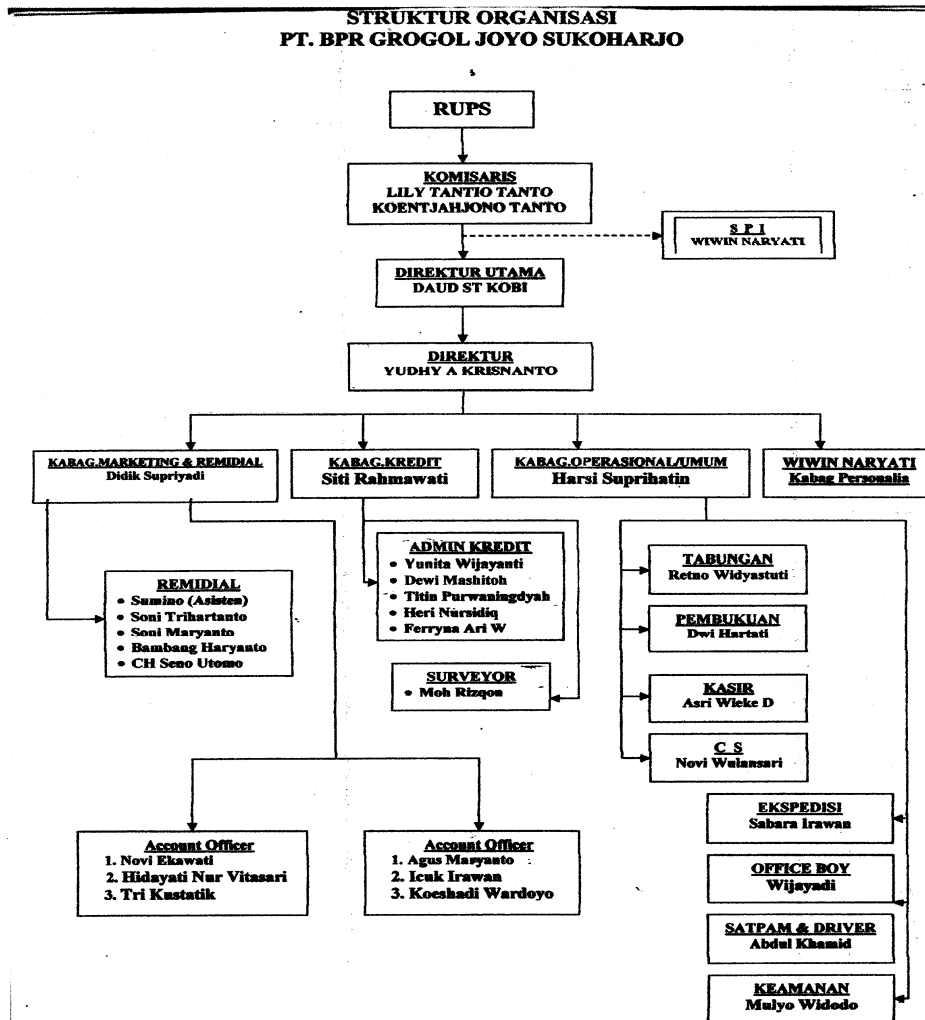
## 4. Divisi Personalia

Merupakan divisi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan BPR serta melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan keputusan intern BPR.

e. Srtuktur Organisasi

Gambar 1.1

Struktur Organisasi



Tugas Dan Kewajiban pada PT. BPR GROGOL JOYO

Berikut ini merupakan fungsi dan tugas dari masing – masing bagian :

1. Dewan Komisaris

Fungsi : Melaksanakan supervise terhadap direksi.

Tugas :

- a. Mengawasi pekerjaan dan tindakan direksi dalam pengurusan harta milik dan pengelolaan perusahaan.
- b. Memberi saran dan nasehat kepada Direksi.
- c. Memberi ijin/persetujuan kepada Direksi dalam hal – hal tertentu.
- d. Menganalisa dan menerima hasil pencapaian tujuan bank.

## 2. Dewan Direksi

Fungsi : memaksimalkan keuntungan dan pertumbuhan bank.

Tugas :

- a. Menentukan kebijakan dalam memimpin Bank.
- b. Mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan Bank.
- c. Direktur Utama mengkoordinir/memimpin kegiatan direksi.
- d. Apabila ingin melakukan suatu tindakan diluar ketentuan harus memerlukan persetujuan atau kuasa dari Dewan Komisaris.

## 3. Pengawasan/Perencanaan

Tugas :

- a. Melakukan/mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas kantor.
- b. Mengadakan pemeriksaan atas administrasi Bank dan anggaran pendapatan belanja Bank.
- c. Meneliti kebenaran dan kelengkapan laporan – laporan keuangan, terutama neraca dan perhitungan rugi/laba.

- d. Mengadakan pengawasan terhadap penyelenggaraan tata kerja dan prosedur dari unit – unit kerja.
  - e. Memberikan saran – saran dan pertimbangan kepada Direksi.
  - f. Menyusun perencanaan Bank jangka pendek ataupun jangka panjang.
  - g. Menyusun rencana keuangan.
  - h. Perencanaan pemasaran.
  - i. Perencanaan system pembukuan sesuai dengan perkembangannya.
  - j. Perencanaan struktur organisasi bila diperlukan karena perkembangan volume usaha.
  - k. Mengadakan koordinasi rencana dari unit – unit organisasi.
1. Kepala Bagian Kredit  

Tugas : Mengelola bagian kredit sehingga terjamin kelancaran pelaksanaan kerja di bagian ini sehingga dapat mencapai sasaran yang ditetapkan.
  2. Kepala Bagian Operasional  

Tugas :

    - a. Mengelola kelancaran tugas operasional BPR sehingga sesuai dengan ketentuan serta procedure yang berlaku.
    - b. Mengatur dan membimbing unit kerja operasional lainnya.
  3. Bagian Personalia dan Umum  

Fungsi : Melaksanakan administrasi dan lain – lain yang berkaitan dengan keputusan intern perusahaan.

Tugas :

- a. Melaksanakan administrasi dan korespondensi untuk keperluan Bank.
- b. Melaksanakan pembayaran gaji dan biaya untuk keperluan Bank serta tunjangan – tunjangan.
- c. Melaksanakan pengawasan absensi dan kedisiplinan pegawai.
- d. Menghitung pajak penghasilan karyawan yang ada hubungannya dengan kesejahteraan karyawan.
- e. Menerima lamaran – lamaran pekerjaan.
- f. Menghitung dan menetapkan hal – hal yang berhubungan dengan fasilitas pegawai.
- g. Mengurus dan menyelesaikan pemberhentian pegawai.

#### 4. Bagian Kredit

Tugas :

- a. Meneliti syarat – syarat dan mengadakan analisa kredit, untuk kemudian mengusulkan kepada Direksi dan Kepala Bagian terhadap setiap permohonan kredit.
- b. Menyelenggarakan administrasi kredit, mempersiapkan dan meneliti perjanjian kredit.
- c. Memelihara dan bertanggung jawab terhadap dokumen yang ada.

#### 5. Bagian Pelayanan Kredit

Fungsi : Melaksanakan koordinasi dengan semua bagian kredit.

Tugas :

- a. Memberikan keterangan tentang syarat dan perosedur kepada calon debitur.
- b. Memeriksa blangko permohonan kredit.
- c. Membuat tanda terima jaminan serta tanda pengambilan jaminan.
- d. Mancatat dalam buku register dan buku harian kredit.
- e. Malaporkan pengeluaran kredit setiap harinya kepada Direksi.
- f. Mencatat setiap jaminan kredit ke dalam buku barang jamnian.
- g. Memberikan berkas pengajuan kredit kepada kepala bagaian kredit untuk diproses.
- h. Memberikan penjelasan kepada nasabah mengenai jumlah kredit yang diperoleh, provisi, bunga, jangka waktu.

6. Bagian Administrasi Kredit

Fungsi : Melaksanakan administrasi pinjaman yang diberikan.

Tugas :

- a. Memperhitungkan bunga.
- b. Menentukan tanggal pengambilan kredit.
- c. Proving posisi pinjaman dan membuat perjanjian kredit.
- d. Malaksanakan pencatatan atas mutasi pinjaan yang di beriaku.
- e. Melaporkan hasil peninjauan serta kemampuan calon debitur.
- f. Membuat laporan rekomendasi kredit untuk direksi dan bank.
- g. Mempersiapkan semua data dan berkas kredit lengkap sampai persetujuannya.



h. Menerima berkas – berkas permohonan kredit.

7. Bagian Pemasaran

Fungsi : Memasarkan produk bank.

Tugas :

- a. Memasarkan produk bank.
- b. Mengusahakan dan merencanakan pengembangan dana.
- c. Mengusahakan dan merencanakan pengembangan/penyebaran kredit.
- d. Memelihara aktivitas rekening nasabah.

8. Bagian Penagihan Kredit

Fungsi : Mengevaluasi kredit.

- a. Mencocokkan jumlah penerimaan angsuran setiap harinya.
- b. Membuat tagihan kredit setiap bulannya.
- c. Membuat surat pemberitahuan/peringatan kepada debitur yang menunggak.
- d. Menagih langsung ke tempat tinggal nasabah.
- e. Pemblokiran barang jaminan.

9. Bagian Tabungan

Fungsi : Melayani pembukuan simpanan dan penutupan rekening tabungan.

Tugas :

- a. Mencatat semua transaksi yang terjadi setiap harinya.
- b. Mencatat mutasi pada buku tabungan.

- c. Mencatat/membukukan semua data yang berasal dari setoran, pengambilan uang, pindahan debet atau kredit yang kemudian divalidasi pada slip dan buku tabungan.
- d. Memelihara dan menyimpan specenmin.
- e. Melaksanakan posting saldo.

#### 10. Bagian Deposito

Fungsi : Melayani pembukuan sampai dengan penutupan deposito.

Tugas :

- a. Melaksanakan proses penerbitan Bilyet Deposito Berjangka.
- b. Menghubungi nasabah tentang Bilyet Depositi yang jatuh tempo.
- c. Melaksanakan proses penerbitan Sertifikat Deposito.
- d. Memeriksa laporan harian tentang mutasi harian/bulanan/tahunan.
- e. Menyusun laporan neraca daftar rugi/laba.
- f. Menghitung pajak perusahaan, laporan bulanan, dan pengeluaran hutang.

#### 11. Bagian Kas

Fungsi : Melayani transaksi jurnal dari nasabah.

Tugas :

- a. Meneliti laporan kas harian.
- b. Memelihara persediaan uang tunai dalam kas box.
- c. Menerima dan melaksanakan pembayaran dari dan kepada nasabah.

- d. Mencatat transaksi kedalam daftar mutasi kas dan membuat rekapitulasi.
- e. Bertanggung jawab langsung kepada nasabah.

## 12. Bagian Pembukuan

Fungsi : Membuat laporan yang autentik dan konsisten.

Tugas :

- a. Membuat laporan neraca harian.
- b. Membuat laporan rugi/laba.
- c. Menyimpan berkas mutasi dengan bank.
- d. Membuat rencana akhir tahun, penilaian rugi/laba, daftar penyusutan inventaris dan perincian pos – pos aktiva administrative.
- e. Membuat laporan likuiditas mingguan ke Bank Indonesia dan kantor pusat.
- f. Aspek Pemasaran

Untuk pemasaran produk dalam BPR PT. GROGOL JOYO adalah dengan promosi brosur produk yang ada di PT. BPR GROGOL JOYO. Selain itu juga dari mouth to mouth. Untuk mdaerah pemasaraanya wilayah Solo yaitu Sukoharjo, Boyolali, Wonogiri, Sragen dan Karanganyar serta daerah – daerah sekitarnya.

f. Produk Yang Ditawarkan

a. Tabungan

Jenis tabungan yang sampai dengan saat ini ada di PT. BPR Grogol Joyo adalah Tabungan Joyo.

Ketentuan dari Tabungan Joyo adalah sebagai berikut :

- 1) Semua lapisan masyarakat dapat menjadi Penabung.
- 2) Sebagai bukti tabungan , menerbitkan Buku Tabungan Joyo atas nama nasabah.
- 3) Apabila terdapat perbedaan antara saldo di Buku Tabungan Joyo dengan yang ada di pembukuan BPR, maka yang digunakan sebagai acuan adalah dari pembukuan BPR.
- 4) BPR dibebaskan dari segala kerugian yang timbul karena kehilangan atau pemalsuan dan atas penyalahgunaan Buku Tabungan Joyo.

b. Deposito Berjangka

Adapun ketentuan – ketentuan yang berlaku pada Deposito Berjangka adalah :

- 1) Setoran Deposito antara Rp 1.000.000,00 sampai dengan Rp 2.000.000.000,00 tiap nasabah.
- 2) Jangka waktu yang diberikan 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

- 3) Bunga yang dikenakan bersifat fluktuatif (berubah – ubah) tergantung dari keputusan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)

c. Kredit

Kredit atau pinjaman yang diberikan oleh PT. BPR Grogol Joyo ada 3 jenis, yaitu :

- 1) Kredit Biasa

Ada 2 macam kredit biasa, yaitu :

- a) Pinjaman Tetap Angsuran (PTA)

Pinjaman yang diberikan dengan pembayaran angsuran wajib tiap bulan, yaitu angsuran pokok ditambah dengan bunga. Bunga yang dikenakan ada 2 macam yaitu Bunga Flatt/Tetap (1,75% tiap bulan) dan Effective/Menurun (2,75% tiap bulan). Jangka waktu yang diberikan antara 6 bulan sampai 24 bulan dengan jaminan BPKB atau Sertifikat Hak Milik. Apabila lebih dari 3 hari dari tanggal angsuran tidak mengangsur, maka akan dikenakan denda.

- b.) Pinjaman Bayar Bunga (PBB)

Pinjaman yang diberikan dengan pembayaran angsuran tiap bulan adalah bunga saja., sedang pokok dibayarkan bebas sampai jangka waktu yang diberikan (bisa dicicil). Untuk jangka waktu PBB ini dalah 6 bulan,

dan bunga yang dikenakan sebesar 2,75% Effective/Menurun tiap bulan. Jaminan yang dapat dipergunakan adalah BPKB atau Sertifikat Hak Milik. Sama halnya dengan PTA, dalam PBB ini apabila dalam jangka waktu lebih dari 3 hari tidak mengangsur sesuai dengan tanggal angsuran maka akan dikenakan denda.

c.) Kredit Paket Pernikahan

Kredit Pernikahan ini diberikan kepada mereka yang akan melangsukan pernikahan sebagai bantuan biaya – biaya pernikahan, pinjaman ini tidak dikenakan bunga (bunga 0%) tetapi jika pelunasan dilakukan pada bulan pertama, artinya jika ada angsuran bulan pertama langsung melunasi, maka pinjaman ini tidak dikenakan bunga. Namun, apabila pada bulan pertama belum ada pelunasan bunga pada bulan pertama tetap 0% (Nol Persen) dan untuk selanjutnya akan dikenakan bunga 2,75% setiap bulannya. Kredit pernikahan ini mendapatkan provisi yang lebih besar dari kredit biasa dikarenakan administrasinya lebih banyak.

d.) Kredit paket Persalinan

Kredit Persalinan ini diberikan kepada pasangan yang akan melangsukan persalinan istri sebagai bantuan

biaya – biaya persalinan. Pinjaman ini tidak dikenakan bunga (bunga 0%) tetapi jika pelunasan dilakukan pada bulan pertama, artinya jika ada angsuran bulan pertama langsung melunasi, maka pinjaman ini tidak dikenakan bunga. Namun, apabila pada bulan pertama belum ada pelunasan bunga pada bulan pertama tetap 0% (Nol Persen) dan untuk selanjutnya akan dikenakan bunga 2,75% setiap bulannya. Sama halnya dengan Kredit Paket Pernikahan, provisi yang dibebahkan juga lebih besar dari kredit biasa karena administrasinya lebih banyak.

## **B. LAPORAN MAGANG KERJA**

### **1. Lokasi magang Kerja**

Tempat dimana penulis melakukan Magang Kerja adalah apada salah satu Bank Perkreditan Rakyat di Sukoharjo yaitu pada PT. BPR GROGOL JOYO dan beralamat di Jalan Raya Solo Baru, Kompleks Plaza HB 01, Solo Baru, Grogol, Sukoharjo.

### **2. Penempatan Magang Kerja**

Untuk magang kerja, penulis ditempatkan pada 2 (dua) bagian yaitu pada Front Office yaitu pada bagian Angsuran Kredit dan pada Bagian Administrasi Kredit. Pada bagian Angsuran Kredit ini, penulis membantu CS untuk penulisan Angsuran pada kartu Angsuran,slip

setoran angsuran, dan kartu pinjaman, selain itu juga melakukan perhitungan Angsuran. Sedangkan pada Bagian Administrasi Kredit, penulis melakukan kegiatan memasukkan data ataupun file – file yang berkaitan dengan file debitur.

### 3. Jangka Waktu

Jangka waktu magang kerja yang dilakukan oleh penulis adalah dimulai dari 01 April 2010 sampai dengan 01 Mei 2010 atau tepatnya adalah selama 1 (Satu) bulan. untuk aktivitas Magang Kerja terlampir.

## C. PEMBAHASAN MASALAH

Untuk data yang di ambil adalah Laporan Keuangan PT. BPR GROGOL JOYO tahun 2009 yang berupa Laporan Keuangan Triwulanan tahun 2009. Untuk mengetahui kondisi Likuiditas pengelolaan Kredit dari PT. BPR GROGOL JOYO maka yang dilakukan adalah menghitung indikator dalam menentukan Likuiditas.

Berdasarkan analisa laporan keuangan di atas maka dapat diperoleh hasil yang menggambarkan hubungan efektivitas pengelolaan kredit dengan likuiditas pada BPR GROGOL JOYO yang tercermin dari beberapa rasio keuangan seperti *Non Performing Loan (NPL)*, *Banking Ratio* atau *Loan to Deposit Ratio (LDR)*, *Quick Ratio*, *Loan to Asset Ratio*, dan *Cash Ratio* pada tahun 2009 yang di sajikan secara triwulanan pada table 3.2 sebagai berikut :



Tabel 3.2

Analisis Indikator Pengelolaan Kredit per Triwulan Tahun 2009 dan Rata – Rata  
Tahun 2009 Dibandingkan Pertauran BI

<b>Rasio</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>
<b>NPL</b>	9,51%	6,47%	6,59%	5,33%
<b>Bangking Ratio (LDR)</b>	65,54%	70,13%	83,98%	73,00%
<b>Quick Ratio</b>	0,53%	0,29%	0,45%	0,20%
<b>Loan To Asset Ratio</b>	57,71%	62,71%	73,07%	70,23%
<b>Cash Ratio</b>	334,20%	356,97%	191,19%	157,90%
<b>ROA</b>	2,06%	2,65%	2,91%	4,01%
<b>BOPO</b>	90,86%	90,58%	89,37%	86,74%

(Sumber : Laporan Keuangan Triwulan tahun 2009 – diolah)

Rata – Rata Nilai Indikator Yang Utama dengan Peraturan BI

<b>Rasio</b>	<b>Rata – Rata Tahun 2009</b>	<b>Peraturan BI</b>
<b>NPL</b>	6,97%	<5%
<b>Bangking Ratio (LDR)</b>	73,16%	85% - 110%
<b>Quick Ratio</b>	0,36%	>1%
<b>ROA</b>	2,91%	>2%
<b>BOPO</b>	89,38%	< 70% - 80%

(Sumber : Peraturan Bank Indonesia)

Berdasarkan pada data rasio keuangan pada table 3.2 Analisis Indikator Pengelolaan Kredit dan Likuiditas per Triwulan pada tahun 2009 dapat di jelaskan sebagai berikut :

- a. *Non Performing Loans* PT.BPR GROGOL JOYO tersebut dalam setahun 2009 menunjukkan nilainya tinggi atau dapat dikatakan kurang sehat karena melebihi batas ketentuan yang telah ditentukan

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, semakin tinggi nilai NPL (diatas 5%) maka bank tersebut tidak sehat. NPL yang tinggi menyebabkan menurunnya laba yang akan diterima oleh bank. Dengan demikian Kolektibilitas Kredit pada PT. BPR GROGOL JOYO komposisinya dari kredit kurang lancar, diragukan, dan macet melebihi batas minimum yang disyaratkan BI. Selama empat triwulan, jika diperhitungkan secara rata – rata maka nilai NPL 6,97%, tetapi pada akhir triwulan IV sudah mendekati nilai 5% yaitu 5,33%. Dengan demikian PT. BPR GROGOL JOYO dapat dikatakan penurunan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet yaitu dimulai dengan mengingatkan nasabah berkaitan dengan kreditnya (angsuran pokok, bunga dan waktu pembayaran sampai jatuh tempo), kemudian upaya lainnya seperti melakukan pemantauan, melakukan pembinaan sampai dengan menagih pinjaman yang berupa jaminan dari nasabah yang tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya. Selain itu kebijakan lain untuk mengatasi adanya kredit macet adalah *Restructuring* dan *Reschedulling*. Kebijakan ini yang dilakukan BPR sehingga pada triwulan IV mengalami penurunan. Dan kebijakan lain adalah bila NPL melebihi batas ketentuan dari BI, maka BPR harus membuat *action plan* (rencana kerja) penurunan NPL yang akan di review oleh BI per tiga bulan sekali.

b. *Banking Ratio* atau *Loan to Deposit Rasio* PT.BPR GROGOL JOYO sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dikatakan sehat adalah diantara 85% - 110%. Dilihat dalam nilai posisi triwulanan PT BPR GROGOL JOYO tahun 2009 nilai LDRnya adalah rendah untuk per triwulannya dan rata – rata tahun 2009 adalah 73,16%. Namun bila dilihat dari per triwulannya dari triwulan I sampai dengan III mengalami kenaikan atau baik, sedangkan pada triwulan IV mengalami penurunan. Adanya penurunan ini disebabkan karena adanya peningkatan kredit bermasalah, penarikan Dana Pihak Ketiga dan adanya kebijakan Kontraksi kredit. Kondisi ini mendorong pada triwulan awal penghimpunan dana baik tetapi dalam penyaluran dananya lebih berhati – hati sehingga kredit yang disalurkan pada akhir triwulan tahun 2009 turun menjadi 73,00%. Dapat dikatakan pula adanya penurunan LDR pada triwulan keempat ini dikarenakan pinjaman debitur turun sedangkan Dana Pihak Ketiga dalam kondisi stabil. Kebijakan dari PT. BPR GROGOL JOYO berkaitan dengan upaya LDR memenuhi ketentuan BI adalah dengan meningkatkan Dana Pihak Ketiga, yang didorong dengan peningkatan dana yang disalurkan kepada debitur secara baik dan berkualitas. Maka dari PT. BPR GROGOL JOYO mengambil kebijakan yaitu dengan memberikan insentif bagi karyawan yang memenuhi target dalam peningkatan Dana Pihak Ketiga.

- c. **Quick Ratio** pada PT. BPR GROGOL JOYO menunjukkan dalam kemampuannya BPR dalam membayar kembali simpanan para nasabah dengan alat – alat likuid yang dimiliki adalah kurang atau *Quick Rationya* rendah untuk per triwulannya karena sesuai dengan peraturan Bank Indonesia *Quick Ratio* dikatakan likuid apabila nilainya lebih dari 1%. Untuk rata – rata tahun 2009 adalah 1,47% yang berarti baik dan mampu membayar kembali simpanan para nasabahnya. Dilihat dari nilai *Quick Ratio* yang per triwulannya rendah ini dikarenakan kebijakan dari bank yang memang meminimalkan atau dana yang ditempatkan hanya seperlunya saja untuk menghindari *idle fund* tinggi. Untuk *Quick Ratio* yang digunakan perhitungan sebagai alat likuid adalah Kas, tetapi selain itu untuk mengantisipasi adanya resiko likuiditas maka bank juga menempatkan dananya dalam Deposito pada Bank umum.
- d. **Loan to Asset Ratio** PT.BPR GROGOL JOYO menunjukkan bahwa dalam kemampuan bank memenuhi permintaan kredit melalui sejumlah jaminan harta yang dimilikinya adalah dalam kondisi normal atau sehat. Nilai rata –rata pada tahun 2009 adalah 65,93%.
- e. **Cash Ratio** PT.BPR GROGOL JOYO menunjukkan penurunan di setiap triwulannya. Namun sekalipun menunjukkan penurunan, dilihat dari nilai rasionya untuk *Cash ratio* ini dalam posisi sehat. Dengan demikian bank mampu untuk melunasi kewajiban – kewajiban yang harus segera dibayar dalam jangka pendek dengan alat – alat likuid

yang dimilikinya. *Cash ratio* sebagai rata – rata dalam tahun 2009 adalah 260,06%.

- f. Rasio **ROA** diartikan sebagai perbandingan antara keuntungan yang diperoleh dengan asset total dalam menjalankan usaha selama kurun waktu yang ditentukan. ROA rasio antara laba setelah pajak dengan total asset. Semakin tinggi ROA yang diperoleh maka dapat diartikan lembaga keuangan tersebut memiliki kinerja keuangan yang baik. Bank Indonesia menentukan untuk nilai ROA adalah  $\geq 2\%$  supaya dikatakan sehat. Pada PT.BPR GROGOL JOYO dilihat dari nilai ROA pada triwulanan tahun 2009 maka dapat dikatakan ROA dalam keadaan baik atau di atas batas yang ditentukan, yang berarti dalam menghasilkan tingkat keuntungan dengan keseluruhan aktiva yang tersedia dalam bank sangat baik. Untuk nilai rata – rata tahun 2009 adalah 2,91%.
- g. Rasio **BOPO** merupakan perbandingan antara biaya operasional termasuk beban bunga dan pendapatan operasional termasuk pendapatan bunga. Semakin besar BOPO menunjukkan pengelolaan kredit bank kurang efisien, tetapi jika dinilai BOPO cenderung menurun maka bank dikatakan sudah melakukan perbaikan untuk efisiensi operasional bank. Dengan kata lain, rasio ini dapat dikatakan efisien dan kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional bank adalah baik atau efisien. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga

kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Berdasarkan Surat Edaran BI No. 3/30 DPNP tgl 14 Desember 2001 nilai BOPO dinyatakan efisien atau ideal bila nilainya adalah 70% - 80%. Bank Indonesia menetapkan  $BOPO \leq 80\%$  maka bank dikatakan dalam keadaan sehat. Pada PT.BPR GROGOL JOYO untuk nilai BOPOnya selama tahun 2009 yaitu rata ratanya adalah 89,39% sehingga dapat dikatakan kurang efisien, karena 9.39% lebih tinggi dari batas maksimum yang ditetapkan oleh BI. Dengan demikian untuk mencapai kondisi yang ideal, manajemen PT. BPR GROGOL JOYO harus mengusahakan melakukan efisiensi sebesar 9,39% sehingga nilai BOPOnya menjadi 80%.

Berdasarkan pada penjelasan diatas maka untuk lebih memperjelas hubungan antara pengelolaan kredit dan likuiditas juga dapat di jelaskan dari beberapa hubungan dari rasio – rasio NPL, LDR, BOPO dan ROA sebagai berikut :

- a. Apabila NPL naik maka BOPO dan LDR juga mengalami kenaikan diikuti ROA akan turun. Hal ini menunjukkan adanya pengukuran kredit yang tidak sehat.
- b. LDR mengalami kenaikan berarti pendapatan mengalami kenaikan, diikuti dengan kenaikan ROA dan penurunan nilai BOPO maka nilai NPL turun yang berarti pengelolaan baik.

c. LDR mengalami kenaikan, NPL nilai stabil diikuti nilai BOPO yang stabil, ROA akan naik. Nilai BOPO stabil ini menunjukkan efektifitas pengelolaan dan efisiensi biaya yang dilakukan.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa ketika nilai NPL turun, sedangkan nilai LDR naik dan BOPO turun maka ROA mengalami kenaikan yang menunjukkan pendapatan bank meningkat yang di ikuti dengan efisiensi biaya operasional (BOPO) atau dapat di katakana kinerja keuangan bank tersebut baik. Tetapi jika penurunan NPL di ikuti dengan adanya penurunan LDR sementara ROA naik dan BOPO turun maka hal ini menunjukkan adanya kebijakan kontraktif pada bank tersebut dimana dana pihak ketiga masih banyak *idle fund*.

Tabel 3.3  
Laba Operasional per Triwulan 2009

<b>Bulan</b> (dalam tahun 2009)	<b>Laba Operasional</b> (dalam ribuan Rp)	<b>Persentase Peningkatan</b>
<b>Maret</b>	112,845	140,02%
<b>Juni</b>	270,851	37%
<b>September</b>	371,072	53,37%
<b>Desember</b>	569,140	-

(Sumber : Laporan Keuangan per Triwulan tahun 2009)

Berdasarkan pada tabel 3.3 dapat di jelaskan bahwa laba operasional yang ini diperoleh dari aktivitas penyaluran kredit mengalami kenaikan tiap triwulannya, mulai dari triwulan I sampai

dengan IV. Peningkatan tertinggi pada triwulan I ke II, sedangkan terendah pada triwulan II ke III. Rata – rata kenaikan pendapatan operasionalnya adalah 76,80 % pada tahun 2009. Pendapatan operasional di peroleh dari pendapatan bunga. Bunga akan diakui sebagai pendapatan jika telah di terima oleh PT. BPR GROGOL JOYO, hal ini karena sistem yang di pakai dalam penghitungan pendapatan adalah *system accrual*. Dengan demikian kredit dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet tidak di perhitungkan dalam penentuan pendapatan operasional bank sebelum bunga tersebut di bayar oleh debitur. Sementara itu kenaikan pendapatan operasional sejalan dengan kenaikan LDR tiap triwulannya. Meskipun pada triwulan IV LDR mengalami penurunan karena adanya *idle fund* yang tidak disalurkan bank. Dengan adanya peningkatan laba operasional ini maka mendorong meningkatnya pendapatan BPR.

Tabel 3.4  
Laba Non Operasional per Triwulan 2009

<b>Bulan</b> <b>(dalam tahun 2009)</b>	<b>Laba Non Operasional</b> <b>(dalam ribuan Rp)</b>	<b>Persentase Peningkatan</b>
<b>Maret</b>	39,031	37,41%
<b>Juni</b>	53,632	(42,56%)
<b>September</b>	30,808	281,48%
<b>Desember</b>	117,526	-

(Sumber 3.4 : Laporan Keuangan per Triwulan tahun 2009)



Sedangkan *fee based income* yang berupa provisi, administrasi dan dari biaya – biaya tabungan diperhitungkan dalam laba non operasional bank. Nilai laba non operasional untuk setiap triwulannya mengalami peningkatan walaupun pada triwulan III mengalami penurunan. laba non operasional ini didapat dari keuntungan penjualan AYDA (agunan yang diambil alih) oleh bank. Untuk dalam pelayanan lainnya PT. BPR GROGOL JOYO belum menyediakannya atau dapat dikatakan pelayanannya masih standar.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya tugas akhir yang berjudul ” **ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KREDIT DALAM UPAYA PENINGKATAN TINGKAT LIKUIDITAS PADA PT. BPR GROGOL JOYO** ” dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektivitas pengelolaan kredit dalam upaya peningkatan Likuiditas yang di lakukan oleh PT. BPR GROGOL JOYO adalah baik atau telah memenuhi ketentuan yang di tetapkan oleh Bank Indonesia dan atau manajemen bank senantiasa mengupayakan untuk memenuhi standar yang di tetapkan oleh otoritas moneter tersebut. Hal dapat tercermin dari beberapa indicator rasio keuangan seperti NPL cenderung mengalami penurunan bahkan pada triwulan IV mendekati 5 %, meskipun indicator LDR nya cenderung meningkat tiap triwulannya. Disisi lain *Quick Ratio* PT. BPR GROGOL JOYO termasuk rendah, tapi rendahnya nilai *Quick ratio* merupakan kebijakan yang diambil oleh bank supaya tidak mengalami *idle fund* untuk dana yang ditempatkan dan *Loan to Asset Ratio* dan *Cash Rationya* menunjukkan nilai yang sehat atau kemampuan bank dalam memenuhi permintaan kredit dan kemampuan dalam membayar kewajiban yang segera dibayar tercukupi. Sedangkan indikator rentabilitas yang terdiri dari *Return on Asset* (ROA) dan BOPO serta nilai Laba Operasional dan Non Operasional PT. BPR GROGOL JOYO. Nilai dari ROA mengalami

peningkatan yang menunjukkan kinerja bank dalam meningkatkan keuntungan dapat dikatakan baik, sedangkan untuk BOPO nilainya mengalami penurunan sekalipun masih diatas ketentuan yaitu 80% yang berarti manajemen belum mampu untuk melakukan efisiensi biaya operasional. Untuk nilai Laba Operasional dan Non Operasional nilainya baik, sehingga meningkatkan pendapatan bank. Dengan demikian pengelolaan kredit yang dilakukan oleh PT, BPR GROGOL JOYO berdasarkan nilai dari setiap indikator Likuiditasnya dan didukung oleh Rentabilitas, maka dapat dikatakan pengelolaan manajemen PT. BPR GROGOL JOYO cukup baik dalam hal kemampuan memenuhi permintaan debitur untuk kredit, membayar kewajiban yang harus segera di bayar dan pencapaian kinerja dalam menghasilkan keuntungan serta labanya. Tetapi masih tingginya rata – rata NPL dan rendahnya LDR serta BOPO perlu di lakukan peningkatan manajemen di bagian tersebut agar kinerja PT. BPR GROGOL JOYO lebih baik.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas, maka peneliti menyarankan sebagai berikut :

- a. Manajemen PT. BPR GROGOL JOYO diharapkan untuk lebih meningkatkan dalam penghimpunan Dana Pihak Ketiga yang diikuti dengan kebijakan peningkatan kredit yang disalurkan kepada masyarakat supaya LDR nya meningkat sehingga diperoleh laba operasional yang

baik untuk mampu memenuhi likuiditasnya. Selain itu juga menetapkan suatu cadangan lain selain kas yang besar supaya cadangan dana untuk bank cukup sewaktu – waktu diperlukan seperti penempatan dana pada produk yang likuid antar bank.

- b. Untuk manajemen bank diharapkan lebih seksama dan menerapkan prinsip kehati – hatian dalam menilai calon debitur. Hal ini berkaitan dengan tingginya nilai NPL dan memperhatikan kualitas kredit yang diberikan supaya tidak menjadi kredit yang bermasalah sehingga dapat memperoleh keuntungan dari kredit yang disalurkan.
- c. Efisiensi biaya operasional dan non operasional bank yang dikeluarkan bank sehingga nilai BOPO nya tidak tinggi atau dapat dikatakan pendapatannya lebih besar dari biaya yang dikeluarkan, sehingga mampu mendorong peningkatan keuntungan bank.
- d. Menyediakan layanan lainnya yang bekerjasama sama dengan pihak lain yang dapat menambah Pendapatan Non Operasionalnya seperti pembayaran listrik, air, telepon ataupun jasa *money changer*.

## DAFTAR PUSTAKA

Hasibuan, Malayu S.P. 2008. *Dasar – Dasar Perbankan*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Kasmir. 2007. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Keempat. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Suhardjono, Mudrajad Kuncoro. 2002. *Manajemen Perbankan*. Edisi Pertama. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta.

Saputro, Nugroho. 2009. *Modul Analisis Kredit*. Surakarta : UNS.

Hasan, M Iqbal. 2002. *Pokok – Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Sotupo, H.B. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Dasar Teori Dan Terapannya Dalam Penelitian*. Surakarta : UNS.

Sugiyono. 1999. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan ke 7. Bandung : CV Alfabeta.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

Website :

[www.google.com](http://www.google.com)

\_\_\_\_\_, penelitian sebelumnya tentang Likuiditas dan Pengelolaan Kredit

\_\_\_\_\_, [repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/.../1/manajemenchairuddin.pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/.../1/manajemenchairuddin.pdf)

\_\_\_\_\_, tag : peraturan Bank Indonesia